

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cenderung berpusat di daerah perkotaan (*urban area*) membuat daerah perdesaan (*rural area*) menjadi semakin tertinggal, baik dari segi infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Hal ini membuat terjadinya ketimpangan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Pada satu sisi pembangunan daerah perdesaan perlu pendekatan yang berbeda dengan daerah perkotaan, hal itu karena perbedaan sektor basis di daerah perkotaan dan daerah perdesaan, sektor basis di daerah perkotaan adalah sektor industri sedangkan di daerah perdesaan sektor basisnya adalah sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan, selain untuk meningkatkan persediaan pangan juga sektor pertanian dapat meningkatkan pendapatan melalui kegiatan ekspor. Menurut Rustiadi (2009) sektor pertanian dapat berperan sebagai *leading sector*, artinya akan memberi pengaruh ke depan (*forward-linkage*) dan ke belakang (*backward-linkage*). Artinya jika sektor pertanian dapat menjadi sektor unggulan suatu daerah maka sektor pertanian tersebut dapat mendorong dan menarik pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Konsep pengembangan yang menawarkan solusi dari permasalahan ketimpangan pembangunan daerah perkotaan dan daerah perdesaan salah satunya adalah dengan konsep agropolitan. Menurut Friedmann dan Douglas (1978) agropolitan merupakan pendekatan perencanaan pembangunan yang termasuk *bottom-up* dengan tujuan yang diharapkan dapat mencapai kesejahteraan dan pemerataan pendapatan lebih cepat dibanding konsep *growth pole*. Agropolitan merupakan sebuah konsep yang sangat penting karena agropolitan dapat mengurangi disparitas antar daerah. Dalam Peraturan Daerah No.10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 dijelaskan bahwa kawasan

agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan yang berada pada perdesaan dan menjadi sistem produksi pertanian dan pengelolaan yang ditunjukkan dengan adanya hubungan fungsional dan hierarki spasial satuan sistem permukiman dan agribisnis. Konsep agropolitan merupakan hasil pemikiran Myrdal atas dasar munculnya permasalahan di negara-negara Benua Asia yang mayoritas berpenduduk padat, dan memiliki sistem pertanian *labor intensive* dalam skala kecil, gagasan Myrdal tersebut lalu diterapkan oleh Friedman dan Douglas (1978) dalam Mercado (2002) pada konsep pembangunan agropolitan. Program agropolitan di Indonesia telah direalisasikan melalui program nasional yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025 pada poin 32 yang menyebutkan bahwa agropolitan merupakan suatu program yang akan diusung untuk pembangunan perdesaan yang berbasis pertanian.

Konsep ini dalam implementasinya mempunyai beberapa kendala yang berasal dari *stakeholder* pembangunan, menurut Sintaningrum dan Setiawan (2017) dalam “*Quo Vadis* Kebijakan Kawasan Agropolitan di Indonesia” kendala tersebut di antaranya kurangnya keseriusan dari pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan agropolitan di daerahnya, kurangnya dukungan jangka panjang dari pemerintah karena terhentinya dukungan dana, orang, dan alat dari pemerintah pusat untuk pelaku kegiatan di lapangan (petani). Lemahnya konsistensi dari pemerintah terkait pengawalan kebijakan yang dikeluarkannya dan lemahnya integrasi kebijakan antar instansi pemerintah. Selain itu dari segi masyarakat yang menjadi kendala adalah tidak adanya motivasi dari masyarakat untuk meningkatkan produksi karena menurutnya kesejahteraan masyarakat diukur dari indeks kebahagiaan, bukan dari indeks kemakmuran.

Kawasan Agropolitan di Kabupaten Serang telah ditetapkan berdasarkan RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, yaitu di Kecamatan Baros dan Kecamatan Waringinkurung. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Serang di sektor pertanian khususnya di

Kecamatan Baros itu sendiri. Pratama (2016) menyatakan kondisi agropolitan di Kecamatan Baros terdapat kurangnya sosialisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan agropolitan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melalui Dinas Pertanian dan masyarakat Kecamatan Baros. Integrasi antar SKPD belum mempunyai komitmen dalam mewujudkan kawasan agropolitan yang optimal. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ma'mun, Karyani, dan Syamsiyah (2012) melakukan penelitian terkait penentuan kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan dan mengidentifikasi penentuan arahan struktur ruang kota kawasan Agropolitan Kecamatan Baros. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan agropolitan Baros belum terlaksana secara optimal menurut Pratama (2016). Untuk dapat memenuhi target yang diharapkan dari penetapan Kawasan Agropolitan Baros tersebut perlu dilakukan studi mengenai evaluasi kondisi eksisting Agropolitan Baros dengan kondisi ideal berdasarkan kunci keberhasilan agropolitan agar tujuan ditetapkannya Kawasan Agropolitan Baros dalam RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Serang di sektor pertanian khususnya di Kecamatan Baros dapat tercapai.

1.2 Rumusan Masalah

Kecamatan Baros telah ditetapkan menjadi Kawasan Agropolitan berdasarkan PERDA No.10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Serang khususnya bagi masyarakat Kecamatan Baros. Permasalahan yang ada di Kecamatan Baros adalah masih sedikitnya permintaan dari pasar terhadap produk-produk hasil olahan di Kecamatan Baros sehingga produk hasil olahan dari Kecamatan Baros belum bervariasi dan sulit mengembangkan dan memfokuskan komoditas yang ada. Permasalahan lain yang ada di Kecamatan Baros adalah belum adanya sarana pendukung sub-sistem agribisnis di tiap desa yang merupakan faktor penting terhadap keberhasilan agropolitan. Selanjutnya sedikitnya informasi terkait program tersebut menjadi salah satu masalah yang ada di Kecamatan Baros. Keberhasilan agropolitan sangat ditentukan dari keberhasilan sistem kelembagaan yang terkait.

Maka pertanyaan yang muncul dari permasalahan tersebut yang akan diselesaikan dalam studi ini adalah **“Sejauh mana kesesuaian kondisi Kawasan Agropolitan Baros yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 dibandingkan dengan kunci keberhasilan agribisnis dalam kawasan agropolitan?”**.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu mengidentifikasi kondisi saat ini dari Agribisnis di Kawasan Agropolitan Baros yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 dan kesesuaiannya dengan kondisi ideal agribisnis di kawasan agropolitan berdasarkan kunci keberhasilan agribisnis dalam kawasan agropolitan. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya variabel-variabel kunci keberhasilan agribisnis dalam kawasan agropolitan.
2. Teridentifikasinya kondisi agribisnis saat ini dari implementasi kebijakan penetapan Kawasan Agropolitan Baros dalam RTRW Kabupaten Serang tahun 2011-2031.
3. Teranalisisnya kesesuaian pengembangan agribisnis dalam kawasan agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang terhadap kunci keberhasilan agribisnis dalam kawasan agropolitan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup berguna untuk membatasi pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Pembahasan ruang lingkup terbagi menjadi ruang lingkup wilayah yang membatasi wilayah studi yang akan dilakukan penelitian dan ruang lingkup substansi membatasi substansi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Program agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang telah ditetapkan dari Tahun 2011, program tersebut telah berlangsung 9 tahun sampai penelitian ini dilakukan sejak program ditetapkan.

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi

Substansi dalam penelitian ini akan dibatasi ruang lingkungannya dengan berfokus pada permasalahan yang akan dibahas. Permasalahan tersebut mengenai evaluasi agribisnis dalam kawasan agropolitan terhadap kunci keberhasilan agribisnis dalam kawasan agropolitan. Substansi yang akan dibahas merupakan kunci keberhasilan agropolitan yang berdasarkan kajian teori pada Bab 2, terdapat 5 kunci keberhasilan agropolitan yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 1.1
Variabel Indikator Ruang Lingkup Substansi

No	Kunci Keberhasilan Agropolitan	Variabel	Indikator
1	Komoditas pertanian	• Komoditas unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • Luas tanam, dan panen komoditas unggulan di Kecamatan Baros. • Jumlah pengolahan komoditas unggulan di Kecamatan Baros.
		• Komoditas penunjang	<ul style="list-style-type: none"> • Luas tanam, dan panen tiap komoditas pertanian di Kecamatan Baros. • Jumlah pengolahan tiap komoditas penunjang di Kecamatan Baros.
2	Sub-sistem usaha tani	• Produktivitas dari bidang pertanian dan perkebunan.	• Luas lahan, tanam, dan produksi pertanian dan perkebunan di Kecamatan Baros.
		• Produktivitas dari bidang peternakan.	• Luas lahan dan jumlah produksi peternakan di Kecamatan Baros.
		• Aksesibilitas menuju lokasi tani	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu tempuh dan jarak tempuh dari pemukiman menuju lokasi tani • Kondisi akses menuju lokasi tani
3	Sub-sistem agribisnis hulu	• Penyediaan alat dan mesin pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah produksi alat dan mesin pertanian di Kecamatan Baros. • Jumlah alat dan mesin yang tersedia di Kecamatan Baros, baik milik petani ataupun pemerintah.

No	Kunci Keberhasilan Agropolitan	Variabel	Indikator
		• Penyediaan benih.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah produksi benih di Kecamatan Baros. • Ketersediaan benih di Kecamatan Baros.
		• Penyediaan pupuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah produksi pupuk di Kecamatan Baros. • Ketersediaan pupuk di Kecamatan Baros.
4	Sub-sistem agribisnis hilir	• Kegiatan pengumpulan dan penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi dan jumlah serta kapasitas gudang penyimpanan produk pertanian di Kecamatan Baros.
		• Kegiatan pengolahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi dan jumlah industri pengolahan di Kecamatan Baros. • Hasil Produksi dari pengolahan produk pertanian di Kecamatan Baros.
		• Kegiatan pemasaran/distribusi produk	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi pasar yang disuplai produk pertanian yang diolah ataupun tidak dari Kecamatan Baros.
5	Sub-sistem jasa-jasa penunjang	• Jasa Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi dan jumlah perbankan dan koperasi di Kecamatan Baros.
		• Pendidikan dan Litbang	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sarana Pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Baros. • Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. • Lokasi tempat penelitian dan pengembangan pertanian di Kecamatan Baros. • Lokasi balai penyuluhan pertanian di Kecamatan Baros.
		• Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Persebaran jalan berdasarkan fungsi dan kelasnya yang menghubungkan seluruh aktivitas pertanian di Kecamatan Baros. • Lokasi dan/atau jumlah terminal dan kendaraan

No	Kunci Keberhasilan Agropolitan	Variabel	Indikator
			angkutan barang di Kecamatan Baros. • Persebaran dan kondisi jaringan irigasi di Kecamatan Baros.
		• Kebijakan pemerintah	• Kebijakan turunan dari RTRW yang mengatur Program Agropolitan Baros. • Bantuan pertanian dari pemerintah untuk pertanian di Kecamatan Baros.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah yang ditetapkan menjadi wilayah studi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Baros. Secara administratif Kecamatan Baros berada di dalam wilayah administratif Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Secara Geografis Kecamatan Baros terletak di sebelah selatan Kabupaten Serang dan berjarak 12 Km dari Ibu Kota Kabupaten, Kecamatan Baros berbatasan langsung dengan Kota Serang di sebelah utara, Kabupaten Pandeglang di sebelah selatan, Kecamatan Petir dan Kota Serang di sebelah timur, dan Kecamatan Ciomas di sebelah Barat. Secara astronomis wilayah Kecamatan Baros terletak pada 06°12899 LS dan 106°07905 BT. Kecamatan Baros memiliki luas 35,47 Km² yang terdiri atas 14 kelurahan/desa.

